



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PATCHURROHMAN  
2. Jabatan : ANGGOTA  
3. NHK : 648034

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 320.000.000

1. Tanah Seluas 750 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KOTA CILEGON , WARISAN Rp. 220.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 2.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 327.500.000

**III. HUTANG** Rp. 100.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 227.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IRFAN ALFI  
2. Jabatan : KETUA  
3. NHK : 648081

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.050.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 12 m<sup>2</sup>/11 m<sup>2</sup> di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 15 m<sup>2</sup>/18 m<sup>2</sup> di SERANG, WARISAN  
Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 15.000.000

- MOTOR, VESPA PX Tahun 1983, WARISAN Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.069.500.000

**III. HUTANG** Rp. 130.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 939.500.000

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MULYA MANSUR  
2. Jabatan : ANGGOTA  
3. NHK : 656168

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, YAMAHA SPM Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	
3.500.000		
2. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T/ SPM SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	4.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	37.000.000
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	18.673.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	63.173.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	194.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-130.827.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SEHABUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 753530

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m<sup>2</sup>/164 m<sup>2</sup> di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m<sup>2</sup>/325 m<sup>2</sup> di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 106.000.000

1. MOTOR, HONDA AUTOMATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000
2. MOBIL, BRIO E Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 9.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.695.716

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 957.695.716

**III. HUTANG** Rp. 230.000.000

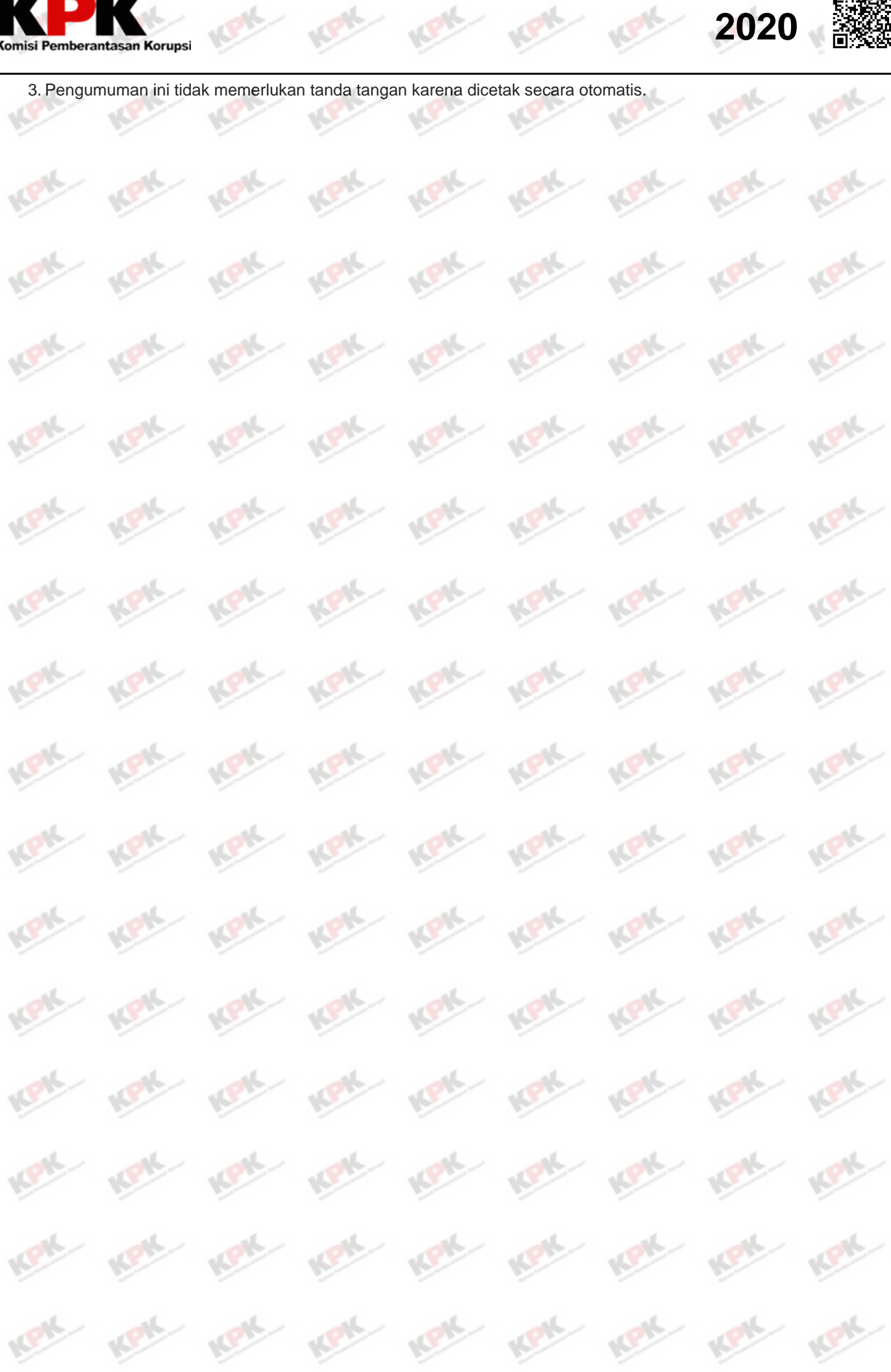
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 727.695.716

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ELI JUMAELI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664767

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 705.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/200 m2 di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 4000 m2 di LEBAK, HASIL SENDIRI Rp.  
155.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 4.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
4.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 710.500.000

**III. HUTANG** Rp. 120.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 590.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.